



HARGA BERAS NAIK DIKELUHKAN PEDAGANG

BACA HALAMAN 2-3



CEKCOK BERJUNG PENGANIAYAAN, KORBAN LUKA, BIBIR 30 JAHITAN

BACA HALAMAN 11



Pedagang Pasar Gusher Keluhkan Harga Beras yang Kian Naik

TARAKAN - Harga beras di Tarakan, terus mengalami kenaikan sejak sebulan yang lalu. Bahkan, kenaikan ini tertinggi sepanjang tahun 2023. Berdasarkan pantauan mediakaltimtera.com di Pasar Gusher, kenaikan harga beras mencapai Rp 25 ribu per karung. Sandi (29), pedagang Pasar Gusher yang telah berjualan beras lebih dari 10 tahun ini mengatakan, kenaikan beras kali ini tertinggi selama

dia menjadi pedagang beras. "Dalam satu Minggu ada dua kali kenaikan dikisaran Rp5.000 per karung. Beras 25 kg juga mengalami kenaikan dari harga Rp355 ribu naik menjadi Rp380 ribu. Ini tertinggi sejauh ini saya berjualan," ungkapnya, Selasa (26/9/2023).

Untuk beras 20 kg, kata Sandy, sebelum mengalami kenaikan harganya berada dikisaran Rp255-265 ribu

per karung. Namun kini naik menjadi Rp 270 ribu.

"Sementara itu untuk per kg naik sekitar Rp1.000-2.000. Beras ini beras premium seperti lahap, lele dan lain sebagainya. Kalau per kg sekarang paling murah Rp 14-15 ribu per kg, dulu Rp 12 Ribu. Beras paling murah Rp278 ribu itu beras Sulawesi. Kalau yang mahal per kg kisaran 15-16 ribu," paparnya.

Selain beras premium, beras kualitas medium yang berasal dari Sulawesi juga naik. Kata dia, naiknya pun tak berbeda jauh dan masih dikisaran Rp20 ribuan per karung. Sandi menyebut ke depan kemungkinan akan terjadi kenaikan harga beras lagi. Sebab yang dia dengar, di beberapa daerah masih terjadi gagal panen. Meski mengalami kenaikan harga, Sandi menyebut untuk pasokan beras masih lancar dan stok masih tersedia.

Dia menyebut imbas dari naiknya harga beras, banyak pelanggan yang mengeluhkan kondisi itu. Tidak hanya itu, omset pun terjadi penurunan meskipun tidak signifikan.

“Dulu kan pelanggan cari yang bermerek sekarang sudah nda bermerek. Yah ada penurunan omset namun belum berpengaruh karena beras kebutuhan pokok,” katanya.

Sementara itu Nurlia (55), salah seorang warga Tarakan membenarkan saat ini terjadi kenaikan beras. Biasanya ia membeli beras Lahab Lele di harga Rp 255 ribu. Namun kini sudah tembus di kisaran Rp 285 ribuan.

“Kalau bulan kemarin belinya masih harga Rp255 ribu, ini baru beli lagi sudah naik mahal sekali, tapi mau bagaimana kita butuh mau dimakan,” tuturnya.

Dengan kondisi ini, ia berharap harga beras bisa kembali stabil dan kembali ke harga semula jika bisa turun lebih murah.

“Karena orang di rumah makannya senangnya merek yang biasa dibeli, kalau ganti merek nanti beda rasa, mau tidak mau keluarkan uang lebih lagi, namanya kebutuhan pokok,” pungkasnya. (apc/and)



Sandi (29), pedagang Pasar Gusher.

ADE/MKR



Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika



Menjaga Eksistensi Bertutur Bahasa Asli Kaltim, di Saat Terpilihnya Kaltim Sebagai Wilayah IKN

SAMARINDA – Dengan ditetapkannya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim), Staf Ahli Gubernur Bidang Reformasi, Birokrasi, dan Keuangan Daerah, Drs. Didi Rusdiansyah, MM, menghimbau masyarakat asli daerah Kaltim untuk melestarikan bahasa asli Kaltim sebagai salah satu produk budaya asli Kaltim agar tidak punah.

Hal ini disampaikan oleh Didi saat menutup rangkaian acara penganugerahan lomba Pustakawanan dan Pengembangan Literasi masyarakat yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kaltim beberapa waktu lalu di ruang serbaguna Pemerintah Provinsi Kaltim.

Didi memberikan contoh tentang budaya Betawi di Jakarta yang tergerus oleh kemajuan kota Jakarta, di mana banyak generasi muda yang meninggalkan budaya asli, termasuk cara bertutur bahasa Betawi.

“Kita sudah dipilih menjadi wilayah IKN, oleh karena itu kita harus mampu menjaga budaya kita, salah satunya adalah bahasa asli daerah Kaltim. Jangan sampai nanti anak cucu kita bertanya, bahasa asli Kaltim apa, kita tidak bisa menjawabnya,” ujarnya.

Menurut Didi, bahasa asli Kaltim meliputi Bahasa Kutai, Bahasa Paser, dan Bahasa Dayak. Namun, saat ini ketiga bahasa ini sudah banyak ditinggalkan oleh penuturnya, terutama karena homogenitas masyarakat Kaltim saat ini.

“Kita sebenarnya tidak kekurangan penuturnya, tetapi sekarang semakin sedikit yang menggunakannya, terutama dengan kedatangan suku-suku pendatang dari Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan, yang membuat masyarakat Kaltim semakin homogen,” ungkapnya.

Selain pengaruh dari pendatang, Didi juga mengatakan bahwa kemajuan teknologi, seperti media sosial yang populer di kalangan generasi muda, juga berkontribusi pada pengurangan penggunaan bahasa asli Kaltim. Meskipun hal ini tidak dapat dihindari, tetapi Didi berpendapat bahwa berbicara dalam bahasa asli daerah bukan berarti bersikap primordial atau etnosentris, melainkan lebih kepada upaya untuk melestarikan produk-produk budaya asli Kaltim yang telah ada sejak lama.

Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kaltim adalah mengadakan lomba bertutur, yang saat ini dikelola oleh DPKD Kaltim. Melalui lomba ini, cerita-cerita rakyat asli daerah Kaltim diangkat sebagai

upaya untuk menjaga budaya Kaltim agar tetap hidup.

“Kedepannya, bukan hanya ceritanya saja yang harus kita pertahankan, tetapi jika memungkinkan, tutur kata juga perlu dilakukan dalam bahasa asli Kaltim,” pinta Didi.

Didi berharap masyarakat pribumi tetap mampu mempertahankan dan melestarikan bahasa asli Kaltim, dengan penetapan IKN di tengah wilayah Kaltim, sebagai karakter budaya asli Kaltim.

“Memelihara bahasa Kutai, Paser, dan Dayak adalah salah satu cara kami untuk menunjukkan eksistensi masyarakat pribumi Kaltim,” tutupnya. (adv/and)



Staf Ahli Gubernur Bidang Reformasi, Birokrasi, dan Keuangan Daerah, Didi Rusdiansyah, saat sambutan pada penutupan penganugerahan lomba Pustakawanan dan Lomba Pengembangan Literasi Masyarakat, DPK Kaltim.

ADV DPK



Pustakawan Seksi Deposit dan Alih Media DPK Kaltim, Patimah Irni.

Lestarkan Naskah Kuno, DPK Kaltim Ajak Masyarakat yang Memiliki untuk Diarsipkan

SAMARINDA – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPK) Kalimantan Timur mengajak masyarakat Kaltim untuk proaktif melestarikan naskah kuno. Karenanya, DPK Kaltim pun membuka ruang bagi masyarakat memiliki koleksi naskah kuno untuk dapat disimpan atau diarsipkan di DPK Kaltim.

Pustakawan Seksi Deposit dan Alih Media DPK Kaltim, Patimah Irni mengatakan, selama ini pihak DPK sangat kesulitan untuk mencari naskah-naskah kuno yang banyak tersebar di wilayah Kaltim. Oleh sebab itu DPK sangat berharap untuk masyarakat bisa menginformasikan agar cepat diarsipkan dan dilestarikan.

“Kita sangat butuh bantuan masyarakat, bahkan jika tidak bersedia untuk diambil, kami bisa datang bisa dialih mediakan agar bisa dilestarikan,” ungkapnya.

Dia juga mengingatkan bahwa naskah kuno mudah rusak, maka pihaknya sangat berharap untuk diinfokan secepatnya oleh masyarakat yang memiliki koleksi naskah kuno agar bisa dibantu untuk dilestarikan dengan cara diarsipkan dan dialih mediakan.

“Naskah kuno itu kan perlu perhatian ekstra, oleh sebab itu sangat berharap kerjasama masyarakat untuk bisa menyelamatkan naskah kunonya dengan dititipkan dan kita akan alih media kan agar tidak hilang, untuk masyarakat yang memiliki tetap kita akan bagi hasil dari alih medianya,” ujarnya.

Baru-baru ini pihak DPKD juga sudah memperoleh naskah kuno dari Kesultanan Gunung Tabur dan Kutai Kartanegara. “Dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ada 11 naskah kuno dan Kesultanan Gunung Tabur Berau ada 13 Naskah, dan ini

masih menunggu untuk di alih bahasakan,” paparnya.

Bahkan beberapa hari lalu. Pihak DPKD telah dihubungi oleh pihak Masjid Raya Darussalam Samarinda, konon masjid tersebut berdiri tahun 1925, dan memiliki beberapa naskah langka agar bisa dibantu untuk dilestarikan.

“Nah pihak masjid sudah menghubungi kita, kita akan bantu untuk lestarian dan menjaga naskah kunonya, agar nanti bisa dipelajari oleh generasi kita nanti,” katanya.

Saat ini naskah kuno dan naskah langka yang dimiliki oleh DPKD sebanyak 24.301 naskah, terdiri dari 20.014 karya cekat dan 4.287 karya non cekat berdasarkan sumber dari data koleksi deposit dan alih media per Juni 2023. (adv/and)



Kepala TK Al Zahra Syifa Budi Samarinda, Siti Jubaidah saat mengarahkan muridnya.

TK Al Azhar Syifa Budi Samarinda, Ajak Muridnya Mengenal Perpustakaan Sejak Dini

SAMARINDA - Mengenalkan anak usia Taman Kanak-Kanak (TK) dengan Perpustakaan merupakan hal positif yang bisa meningkatkan budaya minat baca anak-anak.

Hal tersebut dilakukan oleh pihak Sekolah TK Al Azhar Syifa Budi Samarinda, yang berkunjung ke Perpustakaan Kalimantan Timur (Kaltim) milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPK) Kaltim yang berlokasi di Jalan IR Juanda, Kota Samarinda.

Kepala TK Al Zahra Syifa Budi Samarinda, Siti Jubaidah mengatakan, tujuan kunjungan ke Perpustakaan Kaltim adalah mengajak muridnya untuk mengenal Perpustakaan.

"Kunjungan ini dalam rangka kunjungan pendidikan yang berkaitan dengan tema kegiatan kami, pembe-

lajaran berbasis buku yang menjadi sumber belajar dalam aktivitas harian, bagaimana meningkatkan minat baca pada usia dini," ungkapnya.

52 Murid TK Al Zahra Syifa Budi Samarinda yang hadir sangat nampak senang bermain sambil belajar di ruang belajar anak DPKD Kaltim.

Murid TK Al Azhar Syifa Budi Samarinda, diarahkan untuk memilih buku yang bergambar, kemudian menceritakannya kepada guru.

Dengan dikenalkannya anak-anak dengan perpustakaan dan mengajak mereka untuk melihat buku-buku yang ada di perpustakaan akan membangkitkan minat anak-anak untuk mau belajar membaca.

"Harapannya setelah dari sini, akan membuat kebiasaan anak-anak kearah yang positif yakni

bisa melatih anak untuk membaca apalagi membaca gambar-gambar yang menarik, dari buku yang tersedia disini," ujar Ibu yang lebih akrab dipanggil Endah ini.

Endah juga mengatakan bahwa izin untuk berkunjung ke Perpustakaan Kaltim sangat mudah ditambah para pegawainya sangat ramah.

"Iya kita ajukan beberapa hari sebelumnya kemudian kita dikasih jadwal hari ini, pengajuan izin kesini sangat mudah," katanya.

Diketahui TK Al Azhar Syifa Budi Samarinda, bertempat di jalan Wahid Hasim Gang Kampus Biru, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda Kota. (adv/and)



MARTINUS/MKR

Bupati Bulungan Syarwani saat diwawancarai oleh wartawan beberapa waktu lalu.

Dituntut untuk Berinovasi, Kembangkan Sektor Pertanian di Bulungan

TANJUNGSER – Produksi padi di wilayah Bulungan, masih tergolong rendah. Padahal, kebutuhan setiap tahun alami peningkatan. Sehingga, kadang kala kondisi ini tidak mampu menampung kebutuhan pasar.

Bupati Bulungan, Syarwani menjelaskan, urusan ketahanan pangan Pemkab Bulungan tetap berorientasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bahwasanya, dalam penyusunan, rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, termasuk didalamnya mengevaluasi seluruh kegiatan serta memberikan arah kebijakan anggaran yang optimal pada aspek pertanian.

“Utamanya yang berkaitan dengan peningkatan infrastruktur pertanian, jalan dan jembatan, percontakan sawah di kawasan food estate, termasuk bantuan bibit pertanian serta tenaga untuk penyuluh pertanian,” tuturnya.

Dikatakan Bupati, bahwa kondisi hari ini Pemkab Bulungan tidak bisa pungkiri, produksi pertanian masih kurang. Oleh karena itu, lahan pertanian yang ada saat ini perlu ditingkatkan optimalkan.

“Hal ini, juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah,” katanya.

Syarwani berharap, pengolahan pertanian kedepannya digunakan dengan sekema yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi pangan.

Sebenarnya, pengembangan pangan di Bulungan telah lama dicanangkan semenjak Bulungan ditetapkan sebagai wilayah penyangga pangan di Ibu Kota Negara (IKN), oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Namun, kata Syarwani, sampai saat ini hasil produksi masih relatif rendah dibandingkan kebutuhan. Bahkan, belum cukup memenuhi kebutuhan pangan di Kawasan Industri Pelabuhan Indonesia (KIPI) Tanah

Kuning-Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan.

Pemerintah memproyeksikan, ratusan tenaga kerja akan berlomba untuk bekerja di KIPI Tanah Kuning. Misalkan saja, satu orang kebutuhannya 0,3 kilogram (kg) beras per hari. Jadi, butuh sekitar 30 ton ketersediaan setiap harinya.

Untuk itu, perlu adanya perluasan lahan pertanian di daerah, guna meningkatkan produksi pertanian. Sejauh ini, untuk hasil produksi pertanian di Bulungan rerata masih 4 ton per hektare (ha). Artinya, masih jauh dari target pemerintah. Daerah, diminta untuk inovatif dalam mengembangkan hasil pangan. Mengingat, banyak komoditi yang berpotensi dan belum dikelola dengan maksimal. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika



MARTINUS/MKR

Bupati Bulungan, Syarwani saat menghadiri kegiatan kick off Sosialisasi dan Bimtek Kebijakan DBH.

Dana Bagi Hasil Sawit, 80 Persen Dikucurkan untuk Perbaikan Infrastruktur

TANJUNG SELOR - Berlandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 91 Tahun 2023, tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit, tahun ini Kabupaten Bulungan mendapatkan anggaran sebesar Rp 8,7 miliar.

Pemkab Bulungan, akan memanfaatkan anggaran tersebut sebagian besar untuk pembangunan infrastruktur jalan. Sebesar 80 persen anggaran tersebut dialokasikan fokus terhadap perbaikan infrastruktur jalan sisanya 20 persen diperuntukkan untuk pembangunan lainnya.

“20 persen pembangunan lainnya tetap berdasarkan pada acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,” ucap Bupati Bulungan, Syarwani kepada wartawan baru-baru ini.

Soal pemberian DBH tersebut, diterangkan Syarwani kala mengikuti Kickoff sosialisasi dan bimbingan teknis Kebijakan DBH, yang dibuka langsung oleh Wakil Menteri Keuangan, Prof Suahasil Nazara, di Gedung Radius Prawiro, Kantor Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI di Jakarta.

Bupati menekankan, soal pentingnya kebijakan DBH perkebunan sawit yang berkelanjutan, berpihak pada parapekanisawit dan masyarakatseki-

tar, serta menjaga keseimbangan dan keberlangsungan lingkungan hidup.

Selain itu, DBH yang didapatkan nantinya akan difokuskan pada penanganan eksternalitas negatif dan memperhatikan kebutuhan daerah. Seperti pembangunan infrastruktur jalan sebesar 80 persen dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menkeu sebesar 20 persen.

Dia menambahkan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas jalan yang rusak atau tidak layak. Termasuk, menjaga kelancaran akses transportasi.

“Dan membuka akses baru guna meningkatkan perekonomian lokal yang terkait dengan perkebunan sawit,” tuturnya.

Sedangkan, kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan mencakup bidang pendataan perkebunan sawit rakyat, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelapa Sawit berkelanjutan, pembinaan dan pendampingan untuk sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Termasuk, juga rehabilitasi hutan dan lahan, serta perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar program jaminan sosial. Dilanjutkan, kebijakan DBH

perkebunan sawit harus dilakukan secara berkelanjutan dan berpihak pada kedua belah pihak, yaitu para petani sawit dan masyarakat sekitar.

Dalam hal ini, sambungnya pemerintah hendaknya memastikan bahwa kebijakan DBH sawit yang diterapkan dapat memadukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang. Kegiatan pendukung yang menunjang industri perkebunan sawit yang dapat menghasilkan dampak positif bagi masyarakat lokal dan lingkungan, bukan sebaliknya.

Melalui cara ini, diharapkan pula dapat menjamin ketersediaan bahan baku sawit untuk sektor industri, meningkatkan pendapatan petani sawit, memperbaiki kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan sawit, dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

“Sehingga keberlangsungan lingkungan, kesejahteraan petani, dan kebutuhan industri sawit dapat terpenuhi seirama,” katanya.

Dengan begitu, kebijakan DBH perkebunan sawit dapat bermanfaat bagi semua pihak secara adil, merata dan berkelanjutan. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika



MARTINUS/MKR

Dandim 0903 Bulungan, Kolonel Infanteri Victor Andhyka Tjokro, menegaskan TNI siap amankan Pemilu tahun 2024.

Kodim 0903 Bulungan Siap Kolaborasi Amankan Pemilu 2024

TANJUNGSSELOR - Tahapan menuju perhelatan pemilihan umum (pemilu), ataupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang bakal dilakukan secara serentak pada 2024 mendatang sudah berlangsung.

Saat ini, KPU Kabupaten dan Kota telah menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk calon legislatif maupun perseorangan. Selanjutnya, diberikan waktu sanggahan dan masukan kepada masyarakat terhadap pengumuman yang dikeluarkan, sebelum ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT).

TNI dan Polri bakal berkolaborasi dengan penyelenggara pemilu maupun masyarakat untuk memastikan pemilu yang akan datang, dapat berjalan sesuai rel regulasi dan tetap aman dan kondusif.

Kepada wartawan Dandim 0903 Bulungan, Kolonel Inf Victor And-

hyka Tjokro mengatakan, pihaknya akan berkolaborasi dengan Kepolisian untuk mensukseskan pemilihan umum maupun pilkada yang akan digelar secara serentak pada 2024 mendatang.

"Kita tahu bersama, tahun 2024 nanti kita melaksanakan pesta demokrasi. Pemilu dan Pilkada, Kami dari TNI bersinergi dengan kepolisian, serta stakeholder yang ada siap mengawal supaya pelaksanaannya berjalan, dengan kondusif, aman, lancar," ungkapnya.

Dengan begitu, diharapkan pemimpin yang terpilih sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, Khususnya di Kabupaten Bulungan.

Sementara, ketua DPRD Bulungan, Kilat mengungkapkan, harapan serupa bahwasanya pesta demokrasi merupakan ajang pertarungan yang dilangsungkan per lima tahun. Art-

inya, jangan sampai hanya karena berbeda pilihan melahirkan perpecahan, padahal yang paling penting, persatuan itu tetap nomor satu.

"Kita berharap, masyarakat maupun pelaku politik bisa bijaksana. Dalam menyikapi setiap perbedaan yang ada, tapi persatuan tetap dijunjung tinggi," tegasnya.

Berkaca dari tahun sebelumnya, kata dia di Bulungan bisa dibilang aman dari dinamika politik yang mengandung unsur perpecahan, ataupun adu domba. "Kita berharap wilayah Bulungan ini tetap dalam keadaan aman, kondusif sebagai juklannya yaitu Kota Ibadah," tandasnya. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur

Editor: Andhika



Foto bersama KPU Goes to Kampus UBT Tarakan.

ADE/MKR

KPU Goes to Kampus UBT Tarakan, Beri Pendidikan Politik ke Pemilih Muda

TARAKAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara menggelar kegiatan bertajuk KPU Goes to Kampus ke Universitas Borneo Tarakan, Selasa (26/9/2023).

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah melakukan sosialisasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilu sekaligus memberi pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih di pemilu 2024.

Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kaltara, Hariyadi Hamid mengatakan, jumlah pemilih muda di pemilu 2024 cukup tinggi. Berdasarkan data KPURI, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional sebesar 204.807.222 jiwa, 52 persen di antaranya merupakan pemilih muda.

Pemilih muda itu, kata Hariyadi, mereka yang berusia 17-39 tahun pada saat 14 Februari 2024. "Ini masuk kalangan Generasi Z dan Milenial," lanjutnya.

Goes to kampus, kata dia, merupakan salah satu upaya KPU untuk meningkatkan keaktifan pemilih

muda di pemilu 2024. "Kegiatan KPU goes to kampus, tujuan utamanya pendidikan pemilih. Untuk kemudian pemilih tidak hanya datang ke TPS untuk memilih, namun juga terlibat aktif dalam tahapan-tahapan pemilu," ungkapnya saat diwawancarai awak media usai kegiatan.

Dia menegaskan KPU siap memfasilitasi hak dan ruang bagi pemilih muda dalam penyelenggara pemilu. "Contoh KPU pernah kerja sama pendidikan pemilu dengan teman teman organisasi kemahasiswaan eksternal. Selain itu, kerja sama organisasi kemahasiswaan internal kampus misalnya BEM dan seterusnya. Ini adalah upaya sama-sama untuk punya kesadaran politik. Untuk mereka tidak hanya datang ke TPS juga sekaligus menentukan pilihannya secara bijak. Yah harapannya mendorong menjadi pemilih cerdas," katanya.

Dijelaskannya, ada perbedaan pemilih muda dan pemula dalam pemilu. Lanjutnya, pemilih pemula ada dua kategori yakni mereka yang baru lulus SMA dan genap berusia

17 tahun saat pemilihan 2024 nanti. Atau pensiunan TNI atau Polri yang baru bisa memilih. Berdasarkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Kaltara di pemilu 2024, ada pun jumlah pemilih pemula yakni generasi Z (usia 17-24 tahun) sebesar 107.974. Sedangkan generasi milenial (25-39 tahun) sebesar 175.293.

Sementara itu, menurut Analisis Politik Exposit Strategic sekaligus Dosen LSPR Jakarta, Arif Susanto mengatakan, masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada generasi yang lebih muda sejalan dengan peningkatan jumlah pemilih pemula. Sebagai pemilih, dia menilai mereka harus cerdas secara politik. "Mereka perlu mengenali siapa yang akan dipilih dan melakukan kontrol tidak hanya kepada peserta namun juga penyelenggara. Serta harus menjadi warga negara yang aktif bahkan ketika pemilu usai," pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika



ADE/MKR

Satreskrim Polres Tarakan saat melakukan press release kasus penganiayaan.

Cekcok Berujung Penganiayaan Terjadi di THM Tarakan, Korban Alami Luka Bibir 30 Jahitan

TARAKAN – Kasus penganiayaan yang melibatkan dua orang wanita terjadi di salah satu Tempat Hiburan Malam (THM) di Kelurahan Kampung Satu Skip Tarakan, Sabtu (16/9/2023). Penganiayaan yang terjadi pukul 02.30 dini hari itu menyebabkan korban mengalami luka bibir 30 jahitan.

Kasat Reskrim Polres Tarakan, AKP Randhya Sakhtika Putra mengungkapkan, penganiayaan bermula ketika pelaku berinisial RF (19), merasa bokongnya ditendang oleh korban. Pelaku yang kesal kemudian langsung mendatangi table korban dan melemparkan gelas ke bagian wajah korban.

“Saat di THM pelaku merasa ditendang bokongnya sehingga adu mulut. Pelaku korban tidak saling kenal, kalau dari pemeriksaan pelaku merasa ditendang. Untuk kejadian, pelaku

ada pengaruh minuman alkohol, jadi keduanya sama-sama pengunjung,” ungkapnya.

Akibat lemparan tersebut korban mengalami luka di bibir 30 jahitan. “Saat ini korban masih dirawat di rumah sakit,” ucap AKP Randhya Sakhtika Putra kepada media baru-baru ini.

Usai kejadian tersebut, keluarga korban langsung melapor ke Polres Tarakan. Tak butuh waktu lama, pelaku RF diamankan pada Selasa (19/9/2023) pukul 23.00 Wita di tempat biliar saat terlapor sedang bekerja.

Dari hasil penyelidikan diketahui pelaku bekerja sebagai marka billiar. Korban sendiri merupakan mahasiswa di salah satu kampus di Kota Tarakan. “Pelaku sama dengan teman-temannya bekerja di tempat biliar tersebut. Korbannya wanita juga,” katanya.

Dijelaskannya, pelaku dan korban sebelumnya tidak saling kenal dan tidak pernah ada selisih paham dan murni ketersinggungan saat sama-sama bertemu di THM. Mengenai kondisi korban dia tak bisa menjelaskan apakah sampai cacat permanen atau tidak, sebab hal itu menjadi kewenangan dokter.

“Terkena bagian bibir atas, sampai ke dalam. Dilempar gelasnya. Pecahnya pada saat kena ataupun jatuh ini belum ditanya, yang jelas barang buktinya pecah. Tidak ada riwayat dendam pelaku,” imbuhnya. Atas tindakannya, RF dipersangkakan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika



MEDIA KALTIM PARTNERSHIP TRIP WAKIL KETUA II DPD RI, MAHYUDIN
CEGAH KETIMPANGAN MEGAHNYA IKN

BACA HALAMAN 20



POLSEK KUARO BEKUK 4 TO KASUS SABU DI PASER

BACA HALAMAN 31

Koran DIGITAL



Lebih Dekat dengan Satu Klik

RABU, 27 SEPTEMBER 2023



TERVERIFIKASI
DEWANPERS

PASANG IKLAN HUBUNGI

0811 5405 033



**APBD 2024 DIKETOK
 RP 20,7 TRILIUN**

BACA HALAMAN 2-3



Prosesi penandatanganan kesepakatan APBD Kaltim 2024.

APBD 2024 Diketok Rp 20,7 Triliun

Diklaim Terbesar dan Tren Positif bagi Kemandirian Ekonomi Kaltim

SAMARINDA - APBD Kaltim 2024 disepakati oleh DPRD Kaltim dan Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp20,6 Triliun. Respon positif diberikan oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun.

Menurutnya angka tersebut kembali menyatakan sejarah sebagai APBD terbesar selama pemerintahan di Kaltim. Selain itu ia menilai bahwa dominasi penerimaan Dana Bagi

Hasil (DBH) Migas Batu Bara mulai diambil alih dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Faktor peningkatannya banyak didukung oleh pajak daerah maupun retribusi sementara seperti dana bagi hasil tidak terlalu besar perbandingannya, maka dari itu kemandirian ekonomi kita semakin bagus," ungkapnya usai memimpin Rapat Paripurna, Senin malam tadi (25/9/2023)

Politisi PDI Perjuangan ini 'pun yakin bahwa tahun 2024 mendatang banyak pintu pendapatan lainnya yang dapat menggenjot pendapatan daerah yang berimplikasi pada peningkatan besaran APBD pada tahun berikutnya.

"Pokoknya selalu kita dukung untuk peningkatan ekonomi daerah. Banyak yang akan menjadi sumber pendapatan baru apabila aturan ini diterapkan," tandasnya.

Sementara Gubernur Kaltim Isran Noor yang hadir dalam Rapat Paripurna kesepakatan APBD 2024, menyatakan raihan besaran APBD Kaltim 2024 merupakan bentuk sinergitas Pemprov dan DPRD Kaltim. Ia berharap APBD Kaltim 2024 dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kaltim.

“Sinergi ini menjadi lebih baik dan lebih erat di masa-masa mendatang sehingga dapat mewujudkan pelaksanaan program pembangunan secara luas dan menyeluruh di Kaltim, tentunya akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai informasi APBD Tahun Anggaran 2024 yang disepakati sebesar Rp20,6 triliun, terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp20 triliun dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp10,5 triliun, Pendapatan Transfer Rp9,4 triliun, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp13,86 miliar.

Dari segi belanja daerah telah dialokasikan Belanja Daerah sesuai besaran APBD 2024 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp9,4 triliun, Belanja Modal Rp4,5 triliun, Belanja Tidak Terduga Rp100 miliar dan Belanja Transfer Rp6,5 triliun.

Pewartanya : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari







SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN

* TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel







Informasi - Call/WA :

Adi S : 0822-5435-0088




Bontana



DITUTUP. Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si menghadiri penutupan PKA Angkatan III di Gedung BKSDM Bulungan, Selasa (26/9).

PKA Angkatan III Resmi Ditutup, 6 Orang Peroleh Predikat Sangat Memuaskan

TANJUNG SELOR – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si menghadiri penutupan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III dan dirangkaikan dengan Pembukaan PKA Angkatan VI, Selasa (26/9).

Melalui Datu Iqro, gubernur mengingatkan visi dan misi Kaltara di mana tentunya membutuhkan ASN yang berintegritas, berkompeten, dan berdaya saing. Karena itu diperlukan pelatihan kepemimpinan ini untuk memberikan pembekalan bagi para pemimpin sesuai dengan jenjang levelnya sehingga memacu ASN berinovasi.

"PKA untuk angkatan III berakhir

pada hari ini. Saya berharap semua peserta dapat mengambil poin penting guna meningkatkan kompetensi diri sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan pembangunan nasional," pesan gubernur.

Disisi lain, gubernur juga berpesan kepada peserta PKA Angkatan VI selanjutnya, agar serius mengikuti pelatihan kepemimpinan ini.

"Harapannya, setelah lulus dari pelatihan ini nantinya, akan dapat lebih meningkatkan kinerjanya dengan melahirkan inovasi-inovasi di sektor pelayanan publik guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," tutupnya.

Datu Iqro juga menambahkan, perlunya ada kesadaran tentang

perkembangan dinamika dunia saat ini. Di mana, dari segala penjurur, informasi dan peluang pekerjaan telah terbuka.

Untuk itu, ia menegaskan, sebagai ASN perlu di dorong untuk meningkatkan kualitas dirinya. Dengan mengikuti pelatihan seperti ini membantu para pemimpin dan pejabat di lingkungan pemerintahan secara khusus mengasah kemampuannya.

"Sumber Daya Manusia itu intinya adalah di pendidikan," pungkasnya.

Diketahui sebanyak 38 peserta telah menyelesaikan pelatihannya dan disebutkan oleh Kepala BPSDM Muhammad Ishak sebanyak 2 orang predikat baik, 30 orang mendapat predikat memuaskan, dan 6 orang predikat sangat memuaskan. **(dkisp)**



KEGIATAN PRIORITAS: Sekprov Kaltara, Dr H Suriansyah, M.AP menghadiri Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kaltara, Senin (25/9) lalu.

Perubahan APBD 2023 Kaltara Difokuskan Pada Kegiatan Prioritas

TANJUNG SELOR - Sekretaris Provinsi (Sekprov), Dr. H. Suriansyah, M.A.P., mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) menghadiri Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan III Tahun 2023 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, Senin (25/9) lalu.

Adapun rapat terkait Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2023.

Rapat tersebut dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltara, Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, dan Kepala OPD Pemerintah Provinsi Kaltara, serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan rekan media.

Sekprov menekankan bahwa perubahan APBD TA 2023 berfokus pada pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib, mengikat, efektif, mendesak, dan prioritas, sesuai dengan ketentuan peraturan perun-

dang-undangan.

Sekprov Kaltara, Suriansyah, juga menjelaskan bahwa Raperda tentang APBD-P TA 2023 merupakan bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

"Tentu ini diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat, dengan pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial, berdasarkan pada prinsip money follow program," terang Sekprov Suriansyah.

Suriansyah juga menyebutkan bahwa APBD-P TA 2023 ini dilatarbelakangi oleh perubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kebutuhan operasional rutin OPD, serta kegiatan yang dianggap mendesak dan prioritas.

Selanjutnya, Sekprov menyoroti fokus perubahan APBD-P Kaltara TA 2023 akan menitikberatkan pada penyesuaian prioritas pembangunan, sasaran, arah kebijakan pembangunan tahun 2023, serta penyesuaian target dan indikator kinerja pembangunan daerah.

"Ini termasuk penanganan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, penanganan stunting, penguatan investasi, dan penggunaan produk lokal dan dalam negeri," tutur Sekprov.

Dijelaskan secara keseluruhan, komposisi rancangan perubahan APBD Kaltara 2023 mengalami peningkatan dalam pendapatan daerah sebanyak 21,5 persen. Sementara itu, belanja daerah meningkat sebesar 17 persen, yang terbagi atas Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.

Selain itu, lanjut Sekprov, Belanja Bagi Hasil bertambah menjadi 93 persen, sementara Belanja Bantuan Keuangan (Bakeu) mengalami penurunan.

Sekprov Kaltara berharap pembahasan rancangan perubahan APBD TA 2023 ini akan memberikan dampak positif dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kaltara yang lebih baik, maju, dan sejahtera. **(dkisp)**



KUNJUNGAN KERJA: Ketua TP PKK Kaltara Hj. Rachmawati Zainal, SH mendampingi kunjungan kerja Ketua TP PKK Pusat, Tri Suswati Tito Karnavian di Kaltara.

Rachmawati: Kunker Tri Suswati Tito Karnavian Beri Dampak Positif di Kaltara

TANJUNG SELOR - Usai tiba di Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan pada Senin (25/9/2023), Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pusat, Tri Suswati Tito Karnavian, beserta rombongan bergerak menuju Ibu Kota Provinsi Kaltara, Tanjung Selor dengan menggunakan kapal cepat (speedboat).

Tiba di Pelabuhan VIP, Tanjung Selor, pukul 16.05 WITA, kedatangan istri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ini disambut antusias oleh jajaran pejabat Pemprov dan jajaran TP-PKK Kaltara.

Nampak suasana kebersamaan dan kehangatan sangat terasa saat mereka bersatu untuk menjalani

sejumlah kegiatan yang telah dijadwalkan. Di mana, kunjungan kerja (Kunker) PKK Pusat berlangsung mulai tanggal 25 hingga 27 September 2023, dan dipusatkan di Tanjung Selor.

Adapun beberapa kegiatan yang akan dihadiri oleh Ketua Umum TP-PKK, didampingi oleh Ketua TP-PKK Provinsi Kaltara, yakni Temu Kader PKK, Penyerahan Banper (Bantuan Perumahan) dan Dokumen Kependudukan.

Selain itu, ada juga penyerahan paket bantuan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) kepada kabupaten/kota, melakukan peninjauan terhadap kegiatan Pokja (Kelompok Kerja), serta menggelar Produk UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)

melalui Pokja 2.

Tentunya, masyarakat Tanjung Selor juga akan mendapatkan manfaat dari Gerakan Pangan Murah (GPM), yang akan membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Selain itu, rombongan ini nantinya juga akan mengunjungi sekolah-sekolah setempat untuk memberikan inspirasi kepada generasi muda dan mendukung pendidikan.

"Kehadiran Ibu Tri Suswati Tito Karnavian, yang juga merupakan istri Mendagri, Tito Karnavian, merupakan momen bersejarah. Tentu kunjungan ini membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Kaltara," ujar Ketua TP-PKK Kaltara, Hj. Rachmawati Zainal, S.H. (dkisp)



RAFI'/MEDIA KALTIM

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid (3 dari kiri) saat menyaksikan penandatanganan prasasti peresmian Taman Titik Nol Kesultanan.

Ketua DPRD Kukar Dorong Dunia Usaha Ikut Serta dalam Pembangunan

TENGGARONG - Taman Titik Nol Kesultanan, akhirnya diresmikan secara langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah. Taman yang terletak di depan Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ini, merupakan satu diantara beberapa pembangunan taman di Tenggarong yang masuk dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari 7 perusahaan batu bara di Kukar.

Selain taman di depan Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, juga ada pembangunan beberapa taman lagi di kawasan Central Business District (CBD) Tenggarong.

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, pun memberikan apresiasi kepada para perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan di Kukar. Melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).

"Terima kasih kepada pihak-pihak perusahaan yang sudah berpartisipasi dalam membangun Kabupaten Kutai Kartanegara," ungkap Rasid, Selasa (26/9/2023).

Karena dikatakan Rasid, pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten (pemkab) semata. Dunia usaha pun memiliki kewajiban untuk membantu, ketika memang berinvestasi di Kukar. Sehingga tidak hanya mengeruk

kekayaan alam Kukar saja, namun kembali ke Kukar melalui dukungan pembangunan.

Harapan lainnya, agar perusahaan lainnya bisa ikut serta. Tidak berhenti di 7 perusahaan yang melakukan pembangunan taman ini. Semua perusahaan pun diharapkan ikut terlibat, agar pembangunan di Kukar bisa merata dengan baik.

"Mudah-mudahan perusahaan yang lainnya ikut membangun Kukar, baik itu taman maupun fasilitas lainnya," tutup Rasid. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



RAFI'I/MEDIA KALTIM

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid (2 dari kiri), saat acara Beseprah.

Ikuti Agenda Beseprah, Ketua DPRD Kukar. Semoga Mendapat Keberkahan

TENGGARONG - Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), tampak antusias mengikuti rangkaian Beseprah yang menjadi bagian dalam Pesta Erau Adat Pelas Benua 2023. Dengan menggunakan Baju Miskat, duduk berdampingan bersama Sultan Aji Muhammad Arifin dan Bupati Kukar, Edi Damansyah.

Beseprah sendiri dilaksanakan di hadapan Keraton Kesultanan Kutai

Kartanegara Ing Martadipura.

Ia menyebut Beseprah yang merupakan budaya Kukar, harus terus dijaga keberadaannya. Dan dilestarikan di tengah gempuran era globalisasi dan digitalisasi. Memastikan generasi muda bisa memahami adat, budaya dan tradisinya.

"Mudah-mudahan dengan kegiatan ini pertama menjadi keakraban dan kebersamaan masyarakat Kutai

Kartanegara," ungkap Rasid, Selasa (26/9/2023).

Ia pun berharap, kegiatan yang dilaksanakan tiap tahun ini. Bisa mendapatkan keberkahan, sehingga memberikan kemajuan dan kemaslahatan untuk Kukar kedepannya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari

Koran DIGITAL
MEDIA
KALTIM.com
Lebih Dekat dengan Satu Klik

<http://koran.mediakaltim.com/>

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0811 5405 033

media_kaltim
 mediakaltimdotcom
 mediakaltim.com
 media kaltim



Ketua PKK Kota Bontang, Hapidah Basri Rase bersama Kadisdukcapil, Budiman.

Hapidah Apresiasi Kerjasama UMKM dengan Disdukcapil

BONTANG - Ketua PKK Kota Bontang, Hapidah mengapresiasi perjanjian kerjasama Disdukcapil bersama pelaku UMKM agar anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) bisa mendapatkan diskon di UMKM tertentu.

Kerjasama ini dilaksanakan guna melakukan percepatan anak-anak di Kota Bontang agar segera memiliki (KIA).

"Kita inginnya 100 persen anak di Bontang memiliki KIA, ini sama seperti KTP, bedanya KIA dimiliki oleh

anak berusia 0 sampai 16 tahun," jelasnya.

Dengan adanya kerjasama bersama UMKM ini dapat menjadi dorongan kepada para orang tua untuk segera membuat anaknya KIA. Sehingga mereka dapat memanfaatkan KIA tersebut untuk menikmati fasilitas berupa potongan harga di UMKM.

UMKM yang bekerjasama dengan Disdukcapil diantaranya Pizza Hut, Ok Bento, Toko Buku Aziz, Kenari Waterpark, Lembah Permai, Toko

Buku Al-Hidayah, Playground Dolanan, Andika Baby Shop, Waterboom Nirwana, Mixue, Galaxy Barbershop, Balita, dan Yasaka Fried Chicken.

Hapidah menjelaskan bahwa KIA ini merupakan salah satu hak anak, karena kemungkinan KIA akan menjadi wajib untuk anak masuk sekolah ataupun persyaratan kepengurusan lainnya. (adv)

Penulis: Syakurah

Editor: Nicha Ratnasari



ISTIMEWA/YAHYA/MEDIA KALTIM

Wali Kota Bontang Basri Rase saat menyaksikan penandatanganan kerja sama KIA.

Mudahkan Fasilitas Anak-anak, Wali Kota Bontang Maksimalkan Pemanfaatan KIA

BONTANG – Wali Kota Bontang mendukung pelaksanaan kerja sama antara Disdukcapil dan UMKM dengan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilaksanakan pada Selasa (26/9/2023).

Wali Kota Bontang, Basri Rase menyebutkan PKS dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dan memberikan nilai tambah KIA dengan melakukan perjanjian kerja sama antara Disdukcapil Kota Bontang dengan pihak ke-3 sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, toko buku, toko pakaian tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.

Selain itu, Basri mengatakan dalam memaksimalkan manfaat KIA Pemkot Bontang melalui Disdukcapil juga terus meningkatkan cakupan kepemilikan KIA dengan memberikan sosialisasi/pemahaman pentingnya KIA melalui kegiatan Saskia hebat di 3 kecamatan di Kota Bontang, sekaligus penandatanganan PKS dengan semua lurah di Kota Bontang.

“Saya mengapresiasi kerja keras seluruh pihak. Dari jumlah anak di Kota Bontang pada semester I tahun 2023 sebanyak 59.177 anak, jumlah anak yang sudah memiliki KIA adalah sebanyak 41.697 atau sebesar 74,77 persen,” kata Basri.

Basri menambahkan bahwa tujuan KIA yakni meningkatkan pendataan,

perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. KIA sebagai bukti identitas diri bagi anak berlaku secara nasional dan memudahkan anak untuk mendapatkan pelayanan publik seperti pendidikan, perbankan, kesehatan dan transportasi umum.

“Saya minta agar semua pihak yang terkait untuk saling bersinergi dalam rangka peningkatan cakupan dan pemanfaatan KIA bagi anak-anak di Kota Bontang, seperti OPD terkait,” terang Basri. (adv)

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari

Dra Sri Wahyuni, M.PP
Sekda Prov KaltimDr. Ir. H. Isran Noor, M.Si
Gubernur KaltimH. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si
Wakil Gubernur Kaltimdr.H Jaya Muallimin, Sp.K.J, M.Kes, MARS
Kepala Dinkes Kaltim<http://dinkes.kaltimprov.go.id>

NITA/MEDIAKALTIM

Usai hadir acara peresmian Jaya Muallimin jelaskan progam SKI.

260 Petugas Survei SKI Dikerahkan, Jaya Minta Masyarakat Tidak Palsukan Terkait Kesehatan

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) turut menyukseskan pelaksanaan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) di tahun 2023.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Muallimin mengatakan SKI dimulai sejak tanggal 8 Agustus berakhir pada 6 Oktober 2023.

"Tujuan dari adanya SKI ini adalah gabungan survei untuk mengukur kesehatan masyarakat Kaltim. Dilakukan pengambilan darah, dan melihat karakteristik apa saja dalam kurun waktu 10 tahun masyarakat mempunyai resiko penyakit apa," jelas Kepala Dinkes Kaltim Jaya Muallimin, Pada Selasa (26/9/2023).

Menurut informasi, peran aktif dari Dinkes Kaltim ialah dengan cara memberikan data yang benar saat petugas survei mendatangi rumah warga untuk melakukan pendataan.

"Jadi masyarakat yang didatangi kerumah itu jangan menolak. Harus membantu petugas survei dalam proses pemeriksaan dan pendataan," ujarnya.

Dalam pemeriksaaan tersebut, warga cukup mengumpulkan Kartu Keluarga (KK). Setiap Kabupaten/Kota ada sekitar 70 sampel darah untuk pemeriksaan.

"Dari laporan SKI hingga saat ini baru 50 persen hasil survei. Dan untuk responden dari masyarakat se-

karang sudah terkumpul 700 sampel darah hasil pemeriksaan," bebarnya.

Jaya juga menjelaskan sekitar 260 petugas survei telah dilatih oleh Kementerian Kesehatan pada akhir Agustus 2023. Para petugas itu akan terlibat dalam SKI di berbagai kabupaten dan kota di Kaltim.

"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menerima kunjungan petugas dan memberikan informasi yang sesuai serta tidak membuat data palsu terkait kesehatan mereka," tutupnya. (Adv)

Pewarta : Nita

Editor : Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Posyandu bisa menjadi sarana intervensi dini.

Optimalkan Pelayanan pada Bayi, Balita, dan Lansia

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menggodok pos pelayanan terpadu (posyandu) agar bisa melayani orang yang telah lanjut usia (lansia), di samping memaksimalkan penanganan terhadap pertumbuhan balita dalam program menelan atau mencegah stunting.

"Hal ini berarti layanan di Posyandu akan lebih fokus pada pengawalan siklus kehidupan, di mana lansia, remaja, bayi, dan balita akan mendapatkan layanan yang terintegrasi dalam satu tempat," jelas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kaltim Fitnawati, melalui sambungan telepon, pada Selasa (26/9/2023).

Dijelaskannya, dengan adanya integrasi tersebut, Dinkes Kaltim berharap keluarga yang memiliki bayi atau balita, dan lansia dapat membawa ke posyandu sekitar.

"Tujuannya adalah untuk meningkatkan penanganan terhadap penyakit tidak menular dan mengupayakan kesehatan dan produktivitas kepada lansia," bebernya.

Fitnawati juga berharap, adanya layanan integrasi, Dinkes Kaltim dapat memberikan perhatian yang holistik terhadap kesehatan masyarakat, termasuk pertumbuhan balita dan penanganan kesehatan semua fase usia.

"Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memaksimalkan upaya pencegahan stunting pada balita dan meningkatkan kesehatan serta kualitas hidup lansia," imbuhnya.

Dikemukakannya, dalam pengawasan posyandu bukan hanya melibatkan Dinkes Kaltim, tetapi juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) serta dinas lain yang saling terkait.

Menurutnya juga, salah satu indikator penting yang dipantau dalam posyandu adalah pertumbuhan bayi. Pemantauan pertumbuhan balita saat ini sekitar 40 persen, namun harapannya adalah mencapai 90 persen.

"Dengan memantau pertumbuhan bayi, kita dapat mengetahui jika gangguan gizi dan melakukan intervensi sejak dini," serunya.

Fitnawati turut menambahkan, jika pertumbuhan bayi tidak mengalami kenaikan, pada saat pemeriksaan kedua kali, mereka harus dirujuk. Jika ada indikasi masalah gizi, sudah cukup dengan satu kali pemeriksaan, masa segera merujuk bayi tersebut. "Dengan begitu, petugas kesehatan dapat segera menangani masalah gizi sejak dini," pungkasnya. **(Adv)**

Pewarta : Nita

Editor : Nicha Ratnasari



DISKOMINFO KALTIM

Diresmikan oleh Gubernur Kaltim, Kadis Dinkes Kaltim, dan beberapa jajaran lainnya.

RSUD Korpri Kaltim Berbasis Nasional Akan Beroperasi Tahun 2024

SAMARINDA-Gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Korpri Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) atau RSUD Aji Muhammad Salehud-din II, yang berada di Jalan Wahid Hasyim I, Kota Samarinda.L, diresmikan langsung oleh Gubernur Kaltim Isran Noor.

Direktur RSUD Korpri Kaltim, Dokter E Harleni Aroma, menuturkan bahwa pihaknya masih melakukan persiapan terkait dengan prasarana dan administrasi rumah sakit.

"Kami harus berbenah dulu artinya melengkapi dulu prasarana yang ada, supaya nanti tidak kerja dua kali dan semua sudah lengkap. Kami masih menunggu persyaratan administrasinya selesai," kata Harleni, pada Selasa (26/9/2023).

Ia juga menjelaskan, RSUD Korpri Kaltim akan menjadi rumah sakit khusus dengan beberapa pelayanan

unggulan, sesuai dengan permintaan dari Kementerian Kesehatan.

"Unggulan yang diminta adalah terkait dengan pelayanan cuci darah, selanjutnya kamu akan memenuhi beberapa pelayanan unggulan yang memang diminta oleh kementerian kesehatan salah satunya untuk menjadi RS Ibu dan Anak," ujarnya.

Lebih lanjut, RSUD Korpri Kaltim dipersiapkan menjadi rujukan nasional untuk wilayah Indonesia, Kalimantan Timur khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kemudian, RSUD Korpri Kaltim akan beroperasi pada tahun 2024 mendatang.

Selain itu juga, RSUD Korpri akan menyediakan klinik rawat jalan yang lengkap, termasuk klinik kulit, THT, dan penunjang kelahiran.

Kendati demikian, katanya rumah sakit Korpri tetap akan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk mem-

berikan pelayanan yang terjangkau bagi masyarakat.

"Kita ini bertahap untuk setiap kegiatan rumah sakit, termasuk kegiatan akreditasi atau kenaikan kelas dan perubahan nama rumah sakit semua didaftarkan ke Kemenkes dan sudah di proses dari sekarang," tutupnya.

Terlepas itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin menyatakan, sangat menyambut baik jika di Kaltim memiliki rumah sakit dengan pelayanan unggulan.

"Apalagi pelayanan untuk cuci darah, THT, dan lainnya. Kami sangat mengapresiasi RSUD Korpri Kaltim ini, semoga jika telah beroperasi bisa memberikan pelayanan terbaik," tutupnya. (Adv)

Pewarta : Nita

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala TK Al Zahra Syifa Budi Samarinda, Siti Jubaidah SPd, mengarahkan murid TK nya.

TK Al Azhar Syifa Budi Samarinda Ajak Anak Didik Mengenal Perpustakaan Sejak Dini

SAMARINDA - Mengenalkan dunia literasi ataupun buku-buku pada anak-anak usia dini merupakan hal positif yang bisa meningkatkan budaya minat baca anak-anak.

Hal ini lah yang dilakukan oleh pihak Sekolah TK Al Azhar Syifa Budi Samarinda, yang mengajak para anak didiknya berkunjung ke Perpustakaan Kalimantan Timur (Kaltim) milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kaltim yang berlokasi di Jalan IR Juanda Samarinda.

Kepala TK Al Zahra Syifa Budi Samarinda, Siti Jubaidah SPd mengatakan tujuan kunjungan ke Perpustakaan Kaltim adalah mengajak muridnya untuk mengenal perpustakaan.

"Kunjungan ini dalam rangka kunjungan pendidikan yang berkaitan

dengan tema kegiatan kami, pembelajaran berbasis buku yang menjadi sumber belajar dalam aktivitas harian, bagaimana meningkatkan minat baca pada usia dini," ungkapnya.

Sebanyak 52 anak didik TK Al Zahra Syifa Budi Samarinda yang hadir sangat nampak senang bermain sambil belajar di ruang belajar anak DPKD Kaltim.

Murid TK Al Azhar Syifa Budi Samarinda, diarahkan untuk memilih buku yang bergambar, kemudian menceritakannya kepada guru.

Dengan dikenalkannya anak-anak dengan perpustakaan dan mengajak mereka untuk melihat buku-buku yang ada di perpustakaan akan membangkitkan minat anak-anak untuk mau belajar membaca.

"Harapannya setelah dari sini, akan membuat kebiasaan anak-anak ke

arah yang positif yakni bisa melatih anak untuk membaca apalagi membaca gambar-gambar yang menarik, dari buku yang tersedia di sini," ujar Ibu yang lebih akrab dipanggil Endah ini.

Endah juga mengatakan bahwa izin untuk berkunjung ke Perpustakaan Kaltim sangat mudah ditambah para pegawainya sangat ramah.

"Iya kita ajukan beberapa hari sebelumnya kemudian kita dikasih jadwal hari ini, pengajuan izin ke sini juga sangat mudah," tutupnya.

Diketahui TK Al Azhar Syifa Budi Samarinda, bertempat di jalan Wahid Hasim Gang Kampus Biru, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda Kota. (Adv)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Bagian Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kaltim Nurmanita saat mengarahkan anggota baru perpustakaan seorang mahasiswa.

Cukup 10 Menit, Sudah Bisa Jadi Anggota Perpustakaan Kaltim

SAMARINDA - Setiap hari, perpustakaan Kalimantan Timur (Kaltim) yang berlokasi di jalan Ir Juanda Samarinda, tidak pernah sepi pengunjung, baik itu kunjungan pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum. Setiap hari pula yang mendaftar sebagai anggota Perpustakaan pun selalu ada.

Tercatat dalam satu hari yang mendaftar menjadi anggota perpustakaan Kaltim dari 50-100 orang per hari. "Tergantung harinya sih kak, kalau lagi rame banget bisa sampai 100 orang tapi kalau sepi yang daftar biasanya 50 orang," kata Bagian Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kaltim Nurmanita saat ditemui Mediakaltim.com, Selasa (26/9/2023) siang.

Ramainya pendaftaran anggota perpustakaan, dikatakan Nita, bila musim penerimaan mahasiswa baru (Maba). "Bisa tembus ratusan perharinya jika musim Maba atau saat kunjungan pihak sekolah," pungkasnya.

Banyaknya peminat yang ingin menjadi anggota perpustakaan Kaltim, karena selain fasilitas yang lengkap, cara mendaftar jadi anggota yang sangat cepat.

"Iya kita cukup 10 menit sudah jadi kartu keanggotaan dan kemudian boleh menggunakan fasilitas yang sudah disediakan, dengan gratis," ungkapnya.

Syarat-syarat untuk mendaftar pun simpel untuk yang umurnya 17 tahun keatas cukup dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk umur di bawah 17 tahun atau yang belum memiliki KTP bisa menggunakan Kartu Identitas Anak (KIA) atau kartu BPJS Kesehatan. "Intinya kartu yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)," ujarnya.

Untuk yang memiliki KTP diluar Samarinda juga dibolehkan mendaftar Anggota dan catatan wajib berdomisili di Samarinda.

"Untuk masyarakat ber-KTP Kukar dan Samarinda langsung bisa

mendaftar. Jadi misalkan mahasiswa dari luar seperti Bontang, Balikpapan dan kabupaten kota lainnya, asal memiliki domisili di Samarinda boleh silakan bisa mendaftar anggota. Tapi kalau yang tidak memiliki domisili di Samarinda silakan mendatangi perpustakaan di kota atau kabupaten sesuai KTP-nya, dan kalau ber-KTP luar tapi seorang mahasiswa yang kuliah di Samarinda bisa memanfaatkan perpustakaan kampusnya," katanya.

Di akhir sesi wawancara Nita berharap kepada para pelajar, mahasiswa atau masyarakat umum untuk meramaikan perpustakaan, karena pemerintah sudah memberikan fasilitas, tinggal dimanfaatkan.

"Ayo sering-sering ke perpustakaan, biar lebih ramai dan jika ada masukan bisa menghubungi kami bagian informasi," tutupnya. (adv)

Pewarta : Hanafi
Editor : Nicha Ratnasari



Tekan Dampak Mikroplastik di Laut, Badak LNG Ciptakan “Kapsurula” di Menara Marina

BADAK LNG dalam menjalankan bisnisnya selain berfokus untuk menjaga keandalan kilang dan keamanan operasional, juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan pengembangan masyarakat dengan menciptakan inovasi sosial. Tahun ini, melalui program CSR Menara Marina (Menuju Nelayan Ramah Lingkungan, Mandiri, dan Sejahtera) Badak LNG berinisiatif menjawab kebutuhan pelampung rumput laut yang ramah lingkungan sekaligus berfungsi sebagai alat bantu navigasi di perairan sekitar Kampung Tihi-Tihi, Kelurahan Bontang Lestari.

Seluruh penduduk di Kampung Tihi-Tihi memiliki mata pencarian sebagai nelayan dan 70 persen diantaranya juga berprofesi sebagai petani rumput laut. Dalam aktivitasnya, mereka menggunakan botol plastik sebagai pelampung untuk budidaya rumput laut. Jumlahnya cukup fantastis yakni sekitar 500-1000 botol plastik yang digunakan setiap 3-6 bulan.

“Jumlah botol plastik yang kami gunakan untuk pelampung rumput laut kadang bisa mencapai 500, bahkan 1000 botol. Kemudian botol tersebut diganti dengan yang baru setiap 5-6 bulan. Bahkan bila rusak, dalam 1 bulan pun perlu diganti”, ujar Muslimin, Ketua RT 17 Kampung Tihi-Tihi.

Salah satu penyebab pelampung botol plastik perlu diganti setiap 3-6 bulan karena tidak tahan lama di perairan laut. Bahkan dapat menjadi rapuh dan hancur akibat cuaca panas ekstrem. Hal ini tentunya tidak ramah lingkungan karena dapat menimbulkan mikroplastik. Selain itu, botol plastik transparan juga rentan terkena baling-baling kapal karena tidak terlihat dengan jelas oleh kapal-kapal yang melintas. Sehingga dapat menimbulkan konflik sosial.

Untuk itu, Badak LNG menciptakan alternatif pengganti botol plastik yaitu Kapsurula (Kapsul Pelampung Rumput Laut Ramah Lingkungan). Alat ini dibuat sebagai solusi atas

permasalahan tersebut.

Kapsurula terbuat dari limbah non B3 Polyurethane. Saat ini, Kapsurula diproduksi oleh masyarakat Kampung Tihi-Tihi di bawah binaan CSR Badak LNG. Alat ini menggantikan cara konvensional penggunaan botol plastik pada budidaya rumput laut.

Adapun keunggulan dari terobosan baru ini ialah pada ketahanan alat. Ketahanan Kapsurula ditaksir mencapai 15 tahun. Hal ini tentu dapat menekan penggunaan sampah plastik. Kapsurula juga menjadi navigasi jalur kawasan rumput laut dan transportasi laut dengan dilakukan pengecatan agar nampak dipermukaan lautan.

Dengan munculnya terobosan baru ini menjadi bentuk nyata komitmen Badak LNG dalam menjaga ekosistem lingkungan di lautan dan juga pemberdayaan masyarakat sehingga turut mendukung aspek-aspek dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). (adv)



ISTIMEWA

Penyuluhan awam di lobi RSUD.

RSUD Beri Penyuluhan Masyarakat Terkait Infeksi Jamur pada Kulit

BONTANG – RSUD Taman Husada mengadakan penyuluhan awam terkait infeksi jamur pada kulit, dalam rangka pekan kepedulian terhadap penyakit jamur, Rabu (20/9/23). Penyuluhan awam tersebut dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

Penyuluhan ini dilaksanakan di lobi RSUD yang dijabarkan langsung oleh dr. A. Anwar Arsyad SpKK, FINS DV, AADV kepada masyarakat yang sedang menunggu antrian berobat.

Ia menjelaskan terkait penyakit tinea korporis dan kruris atau biasa disebut kadas dan kurap. Tinea Korporis yakni infeksi jamur yang men-

genai daerah kulit berambut halus kecuali telapak tangan, telapak kaki, dan lipatan paha.

Kemudian tinea kruris adalah infeksi jamur di daerah lipatan paha, area kemaluan, dan bokong.

"Kedua penyakit ini dapat menular, bisa dari kontak langsung dengan sesama manusia atau hewan, kemudian kontaminasi dari tanah yang terinfeksi dan serpihan dari handuk atau sprei," jelasnya.

Adapun faktor resiko seperti pakaian yang ketat, kondisi yang hangat dan lembab, kemudian permukiman yang padat. Penyakit ini juga dapat

mengenai semua umur.

Ciri-ciri terinfeksi jamur tersebut yaitu, gatal, bercak merah berbentuk merah atau lonjong, serta sisik dan tepi lebih merah, dan bercak tersebut bisa berjumlah lebih dari satu.

"Itulah sebabnya ada baiknya kita tidak menggunakan handuk secara bergantian, rutin mengganti sprei dan mengganti pakaian ketika sudah sangat berkeringat, dan jaga kebersihan diri," jelasnya.

Bila sudah terinfeksi, bisa langsung konsultasi ke dokter umum atau dokter spesialis kulit dan kelamin agar segera ditindaklanjuti. **(sya/adv)**

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Bigas Kosmasa No. 116A, Sebelah Kiri, Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive
 Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD
 APLIKASI M-TOYOTA

Urusan Toyota lebih mudah!

AYO IKUTI !! LOMBA VIDEO PENDEK

TEMA
**PERAN PUPR
 Mendukung Infrastruktur
 Destinasi Wisata**

**TOTAL HADIAH
 33 JUTA RUPIAH**

FREE

Dalam rangka menyambut HUT Kota Bontang yang ke-24 dan mensukseskan Bontang Festival 77 Event. Dengan semangat "Energy of Bontang #sinergyandcollaboration", Dinas PUPR Kota Bontang mengadakan Lomba Video. Lomba ini hadir sebagai upaya Dinas PUPR turut berpartisipasi dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur destinasi wisata di Kota Bontang untuk memenuhi nilai-nilai Sapta Pesona (Aman Tertib Bersih Sejuk Indah Ramah Kenangan).

Catat Waktunya :

- 21-27 September 2023 Pendaftaran
- 29 September 2023 (pukul 09.00 wita Seremoni peluncuran lomba video dan pukul 14.00 wita Technical Meeting)
- 30 September 2023 (pukul 06.00 wita Spot Hunting di 3 lokasi
 - Karang Pasilan (Snorkling)
 - Kampung Malahing
 - Pulau Beras Basah
 - + additional : Pulau Segajah
- 12 Oktober 2023 (pukul 20.00 wita pengumuman pemenang secara "live" di acara Gala Dinner HUT Kota Bontang Ke-24 di Pendopo Rujab Walikota)

DAFTAR SEGERA

<https://forms.gle/xCaP8bLjtdAYkhH7>

NARAHUBUNG / CP :
 Heny 081254559928
 Shinta 082256114744

SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA

1. Peserta lomba terbuka untuk umum dengan usia min 17 tahun (kuota terbatas 40 tim)
2. Peserta lomba berkelompok min 3 orang max 4 orang
3. Video merupakan video pendek berjenis video profil infrastruktur pariwisata Kota Bontang berdurasi max 3 menit dengan resolusi video min 1920x1080px
4. Peserta harus mengisi formulir pendaftaran melalui link : <https://forms.gle/xCaP8bLjtdAYkhH7>
5. Video pendek bertema sesuai tema yang di tentukan
6. Peserta lomba hanya mengirim satu video pendek
7. Video belum pernah dilombakan dan dipublikasikan melalui media apapun
8. Video merupakan karya baru, original bukan hasil plagiat/mengambil sebagian hak cipta oranglain, apabila dikemudian hari terdapat gugatan hak cipta maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peserta lomba
9. Transportasi menuju 3 spot lokasi yang ditentukan oleh panitia dalam pengambilan video difasilitasi oleh dinas PUPR hanya 1 (Satu) hari
10. Video mencantumkan subtitle berbahasa Inggris
11. Video yang dikirimkan menjadi hak milik Dinas PUPR Kota Bontang
12. Wajib follow Instagram @ppid.dpuprbtg dan @bontang_tourism
13. Peserta tidak dipungut biaya apapun
14. Video tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, moral, SARA, kekerasan, promosi produk komersial serta tidak mengandung unsur pornografi
15. Materi video dapat diterima panitia paling lambat tanggal 05 oktober 2023 pukul 23.59 wita melalui Email : dpupr25@gmail.com dan ke CP : SHINTA (082256114744)
16. Video yang dikirimkan berhak disiarkan atau ditayangkan oleh panitia untuk keperluan media edukasi dan promosi
17. Keputusan panitia dan dewan juri tidak dapat diganggu gugat
18. Informasi teknis lomba akan disampaikan pada technical meeting
19. Hal-hal yang belum diatur akan diinformasikan berikutnya.



TERVERIFIKASI



DEWANPERS

Lebih Cepat Satu Klik

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
Dr. H. MAHYUDIN, ST, MM

**TOTALITAS
PENGABDIAN**



Wakil Ketua II DPD RI, Mahyudin (tengah) saat menerima cendera mata dari Media Kaltim yang diserahkan oleh Pemred Media Kaltim, Agus Susanto di ruang kerjanya, Senin (25/9/2023).

Mahyudin Ingatkan Solusi Cegah Ketimpangan Megahnya IKN dengan Kondisi Daerah Penyangga

JAKARTA - Media Kaltim Group hingga saat ini terus melakukan Road Show Media Trip. Kali ini, jajaran manajemen Media Kaltim Group yang diwakili oleh Direktur Media Kaltim, Rini Ernawati, Pemred Media Kaltim, Agus Susanto, dan Media Kaltim Biro Jakarta, Nicha Ratnasari, mengunjungi dan sekaligus bersilaturahmi dengan Wakil Ketua II DPD RI, Mahyudin di Gedung DPR/MPR DPD RI pada Senin (25/9/2023).

Saat ditemui, Mahyudin yang mengenakan setelan kemeja batik dengan ramahnya menyambut kedatangan rombongan Media Kaltim Group.

Di awal pertemuan, Pemred Media Kaltim, Agus Susanto mengungkapkan bahwa tujuan kunjungan ini untuk bersilaturahmi dan sekaligus sedikit mengenalkan produk serta jaringan Media Kaltim Group.

"Kedatangan kami ini untuk bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan Media Kaltim Group. Di mana media kami baru 3 tahun berdiri," terang Agus.

Mendengar penjelasan mengenai jaringan Media Kaltim Group, Mahyudin pun tampak merespon positif. Apalagi, Media Kaltim Group sudah mampu memiliki beberapa jaringan di beberapa wilayah di Kaltim, Kaltara, Sulawesi Selatan, dan Bali.

Tak hanya itu, dalam pertemuan ini mantan Wakil Ketua MPR RI ini juga

sempat menyampaikan pandangannya mengenai progres pembangunan IKN di Kaltim. Dia mengingatkan kepada pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Timur untuk lebih cermat dalam menghadapi perkembangan IKN Nusantara. Hal ini guna mencegah adanya ketimpangan antara kemegahan pembangunan IKN dengan kondisi di wilayah daerah penyangga.

"Kaltim beruntung ditunjuk menjadi IKN. Tetapi kan juga harus disikapi dengan cermat. Jangan sampai IKN itu nanti bagaikan surga, dan daerah sekitarnya menjadi neraka. Sehingga ke depannya harus memiliki perencanaan yang komprehensif. Jangan sampai orang terlalu fokus pada IKNnya, namun sisi lainnya terabaikan," ungkap Mahyudin.

Mahyudin mencontohkan kondisi DKI Jakarta yang terlihat begitu megah dan gemerlap. Sementara saat masuk daerah di Lebak, Banten, masih banyak wilayah yang tidak tersentuh. Pertumbuhan ekonomi Jakarta yang luar biasa dengan pendapatan per kapita tertinggi di Indonesia, namun di kota penyangganya justru banyak juga masyarakat miskinnya.

"Inilah yang harus diantisipasi oleh Kaltim. Jangan sampai IKN yang megah dengan kucuran dana ratusan triliun, tapi orang Kaltim baik SDM, infrastrukturnya, justru tidak terangkat dengan keberadaan IKN itu. Itu yang

harus hati-hati. Nanti akan jomplang atau ada ketimpangan," tuturnya.

Lebih lanjut Mahyudin menambahkan, saat ini Kaltim memiliki anggaran atau dana yang cukup melimpah. Bahkan, APBD pun naik signifikan dengan angka yang cukup fantastis. Akan tetapi masyarakatnya belum mampu melihat dampak dari anggaran yang banyak tersebut pada peningkatan ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya.

"Contoh lagi, jika kita bergeser meninggalkan Balikpapan atau Samarinda saja, sudah terlihat bagaimana kondisi wilayah yang tingkat ekonomi masyarakatnya menengah ke bawah masih mendominasi, infrastruktur jalannya juga tidak layak dan lain sebagainya. Itu realita di lapangan. Itu yang harus segera dituntaskan," tegas Mahyudin.

Karenanya, dia kembali berpesan agar ke depannya para pemerintah daerah di Kaltim untuk dapat segera temukan solusi guna mencegah ketimpangan tersebut.

"Harus segera dipikirkan. Banyak orang berpikir bahwa Kaltim itu sangat kaya, perlu dikelola lebih baik. Bukan berarti yang sekarang kurang baik, tapi tentunya masyarakat memang butuh dampak yang lebih besar dengan modal dasar yang juga cukup besar tersebut," pungkasnya.

Pewarta : Nicha Ratnasari



PROMO TRAKTIR TEMAN BUY 4 GET 1 FREE

Start From ^{Rp}15.000 nett/person



Nasi Goreng Kampung



Mie Goreng Kampung



Tempe Goreng Tepung



Pisang Goreng Kaya



Teh Tarik Spirit

BEBAS PILIH MENU !

*syarat dan ketentuan berlaku

www.hotelgrandkartika.com/inspirasi



SAMARINDA

GASTRONOMY PACKAGE



Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 18 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 75 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:

@ibishotelsamarinda 0811 - 551 - 6000

all.accor.com



Rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi guna mengesahkan empat Raperda jadi Perda.

Rapat Paripurna, DPRD Berau Setujui 4 Raperda Jadi Perda

TANJUNG REDEB - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi guna mengesahkan empat rancangan peraturan daerah (Raperda) Berau menjadi Perda, di ruang paripurna DPRD Berau, Selasa (26/9/2023).

Masing-masing dari 7 fraksi yang ada menyampaikan pendapat akhir mereka, yang diawali dengan Partai Nasdem, Golkar, PPP, PKS, Demokrat, PDI Perjuangan dan terakhir AIR.

Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi tersebut disampaikan masukan serta persetujuan terhadap masing-masing Raperda. Yakni, Raperda Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, Raperda Pengumpulan Uang dan Barang, Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

Adapun semua fraksi menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Berau dengan berbagai saran dan masukan.

Bupati Berau Sri Juniarsih dalam sambutannya menuturkan, terimakasih kepada semua anggota DPRD Berau yang telah menyampaikan pendapat, saran, dan harapan, baik dalam penyampaian pendapat akhir

fraksi-fraksi, maupun pada saat pembahasan di tingkat fraksi.

Disadari, pada saat proses pembahasan maupun sebelumnya, telah banyak dialog dan diskusi yang menghasilkan masukan positif dalam rangka penyempurnaan terhadap Raperda menjadi Perda, dan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

"Semua masukan, saran, dan harapan dari anggota DPRD tentunya akan diadakan sebagai referensi, sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan berbagai kebijakan pemerintah daerah di waktu yang akan datang," ucapnya.

Dengan penyampaian pendapat akhir terhadap empat butir Raperda ini, diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap upaya peningkatan kinerja pemerintahan daerah, terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik reformasi birokrasi, sekaligus peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, pendapat akhir fraksi Nasdem, yang dibacakan oleh Dedy Okto Nooryanto menyampaikan beberapa catatan yaitu, agar Perda yang ada nantinya dapat disosialisasikan dan aturan teknis pelaksanaan dapat dilakukan secara baik kepada masyarakat, agar dipahami dengan jelas.

"Khusus untuk pengarusutamaan gender nantinya tentu kesetaraan dan keadilan gender semakin dapat diwujudkan di Berau," katanya, Selasa (26/9/2023).

Hal ini perlu komitmen kuat dari semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk dapat melaksanakan pembangunan yang sifatnya responsif terhadap kesetaraan gender.

Selanjutnya dari fraksi PKS yang dibacakan, Rahman menyampaikan, setelah ditetapkan menjadi Perda hendaknya pemda giat mensosialisasikan perda tersebut secara intensif dan terintegrasi. Agar hasil yang diharapkan bersama dapat tercapai dengan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Berau.

"Kemudian pemda juga dapat mengapresiasi perangkat lanjutan yang mendukung program kegiatan pada perda ini agar terlaksana dengan baik," ungkapnya.

Yakni, melalui dukungan peraturan bupati (Perbup) maupun dukungan pembinaan setiap organisasi dan SDM yang ahli, berkualitas dalam penyelolaan perda yang profesional, tangguh, gesit dan cekatan. Sehingga, apa yang menjadi tujuan perda ini dapat tercapai. (mnz/dez)



Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Tri Budi Utomo berfoto bersama 223 prajurit TNI AD kenaikan tingkat Merpati Putih.

223 Prajurit TNI AD Lulus Kenaikan Tingkat Merpati Putih

BALIKPAPAN - Sebanyak 223 prajurit TNI AD dari berbagai satuan di wilayah Kodam VI/Mulawarman mengikuti ujian kenaikan tingkat Merpati Putih di Yonif Raider 600/Modang, Balikpapan, Selasa (26/9/2023).

Ujian yang berlangsung selama satu hari itu diikuti oleh prajurit dari Yonif Raider 600/Modang, Yonif Raider 611/Awang Long, Yonzipur, pejabat Pabandya dan Kowad Kodam VI/Mulawarman.

Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Tri Budi Utomo mengatakan, bahwa ujian kenaikan tingkat Merpati Putih bertujuan untuk menguji kemampuan dan mental para prajurit.

"Lari tanpa alas kaki ini sebagian kecil dari ujian yang akan dilakukan di level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, saya harapkan prajurit terus berlatih dan meningkatkan kemampuannya," ujarnya.

Semua peserta dinyatakan lulus

ujian dan berhak naik ke sabuk merah. Pada akhir kegiatan, Pangdam VI/Mulawarman memimpin upacara kenaikan sabuk Merpati Putih.

Dalam momen tersebut, Pangdam mengucapkan selamat kepada para peserta yang telah berhasil naik tingkat. Dia berharap para prajurit dapat terus berlatih dan meningkatkan kemampuannya agar dapat menjadi prajurit yang tangguh dan profesional.

"Saya mengucapkan selamat kepada para peserta yang telah berhasil naik tingkat. Mudah-mudahan dari yang ada di sini ada yang menjadi atlet silat dan kalian punya andil bagi negara ini. Serta pelestarian pencak silat tetap terjaga," tutupnya.

Seperti diketahui ujian dimulai dengan materi lari 5 kilometer tanpa alas kaki. Peserta harus berlari sejauh 5 kilometer di lintasan yang berlumpur dan berbatu. Ujian ini bertujuan untuk menguji stamina dan mental peserta.

Selanjutnya, peserta mengikuti materi uji RGT dan tangkap kunci. Ujian ini bertujuan untuk menguji kemampuan peserta dalam melakukan teknik-teknik bela diri Merpati Putih.

Peserta melanjutkan ujian dengan materi pemecahan. Ujian ini bertujuan untuk menguji kemampuan peserta dalam memecahkan benda-benda keras.

Pukul 11.15 Wita, upacara kenaikan sabuk Merpati Putih dilaksanakan. Dalam upacara tersebut, Pangdam VI/Mulawarman memimpin pengucapan janji dan penyematan sabuk merah kepada para peserta yang telah lulus ujian.

Ujian kenaikan tingkat Merpati Putih ditutup dengan ramah tamah di Pantai Manggar. Dalam ramah tamah tersebut, peserta dan pelatih saling bertukar cerita dan pengalaman.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Truk naas yang mengangkut batu bara terguling di Tol Balsam Kilometer 12.

Truk Muatan Batu Bara Terguling di Tol Balsam

BALIKPAPAN - Kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) kembali terjadi. Kali ini melibatkan sebuah truk bermuatan batu bara, yang terguling di kawasan Kilometer 12 Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara pada Selasa (26/9/2023) sekitar pukul 05.00 Wita.

Truk bermuatan batu bara dengan nomor polisi KT 8339 LN sempat membuat kemacetan, namun tidak berlangsung lama. Pasalnya, petugas jalan tol langsung membersihkannya.

Direktur Utama PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda, Jinto Sirait mengatakan, kecelakaan yang terjadi di Tol Balsam tersebut sudah

ditanganin pihaknya dan selang beberapa waktu kondisi jalan tol sudah normal kembali.

"Betul (kecelakaan). Saat ini sudah ditangani dengan baik," ujar Jinto dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp.

Sementara itu Dir Lantas Polda Kaltim, Kombes Sonny Irawan melalui Kasat PJR Dit Lantas Polda Kaltim, Kompol La Ode mengatakan, kecelakaan tunggal tersebut terjadi pada Selasa pagi sekitar pukul 05.00 Wita.

Truk bermuatan batu bara tersebut melaju dari arah Samboja menuju Balikpapan. Saat tiba di Kilometer 12 Tol Balsam, truk yang dikemudikan sopir berinisial Z tersebut mendarak mengalami pecah ban belakang

sebelah kiri. "Kemudian truk hilang kendali dan terbalik," ujar La Ode.

La Ode menambahkan, dalam kecelakaan ini tak ada korban jiwa, dan petugas PJR yang berada di lokasi kejadian juga langsung melakukan evakuasi pada truk nahas tersebut. "Sendirian sopirnya, dia tidak membawa kenek," jelasnya.

Selain itu, La Ode menyebutkan, kecelakaan di Tol Balsam biasanya diakibatkan faktor kelalaian pengemudi. Mulai dari melebihi batas kecepatan hingga mengantuk. "Sebab lain adalah faktor kendaraan, seperti yang baru-san pecah ban," tutup La Ode.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



ISTIMEWA/YAHYA/MEDIA KALTIM

Danramil, Kapten Inf Niko Katani saat memberikan arahan kepada anggota Babinsa.

Danramil 0908-01/Loktuan Tekankan Babinsa Jalin Komunikasi ke Masyarakat

BONTANG – Komandan Koramil (Danramil) 0908-01/Loktuan, Kodim 0908/Bontang Kapten Inf Niko Katani memimpin apel pagi sekaligus memberikan pengarahan dan penekanan kepada seluruh anggota Koramil di halaman Kantor Koramil Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang pada Selasa (26/9/2023).

Pengarahan dimaksudkan untuk memberikan semangat dan penekanan pada tugas pokok anggota komando di wilayah tempat bertugas.

“Kepada seluruh anggota Koramil, dalam hal ini Babinsa untuk tetap

solid dan semangat kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai aparat komando kewilayahan untuk melayani dan mengayomi masyarakat di wilayah masing-masing,” jelas Danramil Kapten Inf Niko Katani, Selasa (26/9/2023).

Ia melanjutkan bahwa tugas anggota TNI seperti Babinsa haru memberikan rasa tanggap dan kepedulian, bertanggung jawab dan dapat menyelesaikan masalah dalam menghadapi masyarakat.

“Para Babinsa harus tanggap dan peduli pada tugasnya serta bertanggung jawab dalam mengelola, memberdayakan dan menyelesaikan seti-

ap tantangan tugas dalam menghadapi masyarakat,” tegas Niko Katani.

Ia juga mengimbau kepada anggota TNI di Koramil 0908-01/Loktuan untuk menjaga keakraban kepada masyarakat.

“Selalu jalin keakraban dengan warga binaan, salah satunya dengan melakukan Komunikasi Sosial (Komsos) dalam menciptakan interaksi serta kekompakan antara Babinsa dan masyarakat,” tutupnya.

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Penyuluhan Bahasa Indonesia bagi guru dan pengawas sekolah di Bontang.

Guru BI dan Pengawas Sekolah Ikuti Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia dari Kantor Bahasa Kaltim

BONTANG – Dalam peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia bagi guru Bahasa Indonesia dan pengawas sekolah, Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur memberikan penyuluhan bahasa Indonesia bagi guru Bahasa Indonesia tingkat SMP/MTS se-Kota Bontang pada Selasa (26/9/2023) di Hotel Tiara Surya.

Pelaksana kegiatan Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan, Evi Melila Sari menjelaskan kegiatan peningkatan kemahiran berbahasa bagi guru dan pengawas sekolah diberikan untuk menambah pengetahuan guru Bahasa Indonesia dan pengawas sekolah serta penyuluhan mengenai Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan edisi Lima. Ia mengatakan selain itu, kegiatan juga memberikan informasi mengenai kebijakan terkait kebahasaan dan kesastraan di kan-

tor bahasa provinsi Kaltim.

“Kegiatan dimaksudkan untuk memberikan penyegaran mengenai kebahasaan bagi guru, informasi mengenai kebijakan kebahasaan dan kesastraan dan penyebarluasan mengenai EYD edisi ke V,” kata Evi Melila Sari saat ditemui Media kaltim.com, Selasa (26/9/2023).

Selanjutnya, Evi mengatakan kegiatan diikuti sebanyak 40 peserta dari guru Bahasa Indonesia dan pengawas sekolah yang ada di Kota Bontang.

“Ini penyuluhan kegiatan bahasa Indonesia memang rutin dilaksanakan ditambahkan tadi mengenai penyebarluasan EYD edisi lima,” katanya.

Evi mengatakan hasil dari kegiatan penyuluhan ini dapat memberikan pengetahuan kepada guru bahasa

Indonesia yang nantinya dapat menyampaikan kepada rekan-rekan guru di sekolah masing-masing.

“Sudah ada beberapa yang mengetahui EYD ke lima. Ini penyebarluasan yang lebih luas, jadi kita sampaikan ke guru dan pengawas yang akan menyampaikan kembali ke rekan sejawat dan siswa-siswi di sekolah agar mengetahui EYD ke lima,” ungkapnya.

Penyuluhan bahasa Indonesia pun diisi narasumber dari kantor bahasa provinsi Kaltim yakni Halimi Hadibra, Nur Bety, dan Dwi Haryanto yang memaparkan materi mengenai kebijakan kebahasaan dan kesastraan hingga Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Edisi V.

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



RAFI'I/MEDIA KALTIM

Peresmian Taman Titik Nol Kesultanan, yang berada di hadapan Museum Mulawarman Tenggarong.

Tenggarong Dipercantik, Taman Titik Nol Kesultanan Akhirnya Diresmikan

TENGGARONG - Keinginan mempercantik Tenggarong, sebagai pusat ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), satu visi dengan beberapa dunia usaha yang berinvestasi di Kukar. Tidak melulu, hanya mengejar profit dalam mengeruk hasil alam Kukar saja. Namun juga terlibat penuh dalam proses pembangunannya.

Salah satunya, dengan peresmian Taman Titik Nol Kesultanan yang berada di depan Museum Mulawarman Tenggarong. Nama taman ini pun, terinspirasi dari lokasinya yang berada di depan Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Peresmian ditandai dengan potong pita berbalut bunga melati, dan penandatanganan prasasti.

Taman ini pun diketahui merupakan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang masuk dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Bersama beberapa taman lainnya yang berada di kawasan CBD Tenggarong. Dengan total Rp 5,3 miliar anggaran yang digelontorkan oleh 7 perusahaan batu bara.

"(Beberapa taman) masih dalam finalisasi pengerjaan," ungkap Edi Damansyah, bupati Kukar, Selasa (26/9/2023).

Namun, Edi menyebut masih ada perusahaan yang terus konsisten membantu, tapi ada juga yang masih setengah-setengah. Dibuktikan dengan puluhan perusahaan yang menanamkan modalnya dan beroperasi di Kukar, baru sebagian yang peduli dengan pembangunan.

Meskipun begitu, saat ini dikatakan orang nomor satu di Kukar tersebut sudah terorganisir dengan baik. Terutama yang berada di dalam Forum TJSP.

"Saya juga meminta optimalisasi program CSR dengan program prioritas kami di Kukar. Taman ini bagian infrastruktur, ada juga pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan," lanjut Edi.

"Semua (pembangunan taman) hampir selesai, sudah 90 persen yang selesai," tutup Edi.

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari





RAFI'I/MEDIA KALTIM

Ruang Sidang Tirta, Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong yang menjadi ruang sidang terdakwa Zulkifli.

Sidang Lanjutan Direktur PT MPAS, Terdakwa Klarifikasi Terkait Pengrusakan Lahan

TENGGARONG - Direktur PT Mahakam Prima Akbar Sejati (MPAS), Zulkifli, kembali menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong terkait tuduhan pengrusakan lahan di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Budiduta Agromakmur (PT BDAM), di Jonggon, Kecamatan Loa Kulu

Zulkifli menjelaskan, agenda persidangan kali ini, yakni memberikan keterangan dan mengklarifikasi atas kasus yang telah dituduhkan oleh PT BDAM kepada dirinya. Di mana ia beranggapan kasus hukum yang menjeratnya ini tidak tepat sasaran.

Ia mengklaim perusahaan yang dipimpinnya tersebut, memiliki kuasa untuk melakukan proses produksi kegiatan pertambangan batu bara. Yakni melalui Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan (PKPL) yang ditandatangani pada 2012 tersebut.

Lebih-lebih ia pun sudah melengkapinya dengan berbagai dokumen penting, salah satunya dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Belanja (RKAB) yang menjadi dokumen pamungkas sebelum

melakukan produksi pada 2022 lalu.

Dan yang menjadi masalah, PT BDAM merasa memiliki nomor pembatalan IUP (Izin Usaha Pertambangan) atas PT MPAS yang diberitahukan pada november 2021.

"Untuk itu, pada hari ini kami lebih banyak mengklarifikasi apa yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum, sudah kita jawab dalam bentuk surat. Selanjutnya kami tunggu surat gubernur dan ESDM," ungkap Zulkifli, pasca persidangan.

Lanjut Zulkifli, padahal ia sudah mempertanyakan kepada Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Kaltim dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim. Terkait pernyataan pembatalan IUP yang dimaksud. Namun dua dinas teknis tersebut, tidak ada menerima surat pembatalan yang dimaksud.

"Karena telah mendapat RKAB kemudian kami bekerja. Yang membingungkan adalah, pada Agustus 2022 saat kami melakukan pengalihan batu bara, kemudian ada surat

pembatalan yang sampai ke tangan kami," lanjutnya.

"Saat kami terima itu kami tidak bekerja sampai hari ini. Yang membingungkan lagi saya menjadi ter-sangka dengan dasar melakukan pengerusakan. Padahal saya bekerja dengan landasan hukum PKPL bersama dengan PT BDAM. Berdasarkan surat notaris dan diberikan oleh direktur PT BDAM," timpalnya lagi.

Padahal Zulkifli mengklaim sudah bekerja sesuai aturan. Yakni berdasarkan PKPL, IUP dan OP serta RKAB 2022 yang asli. Tetapi, ia malah dijadikan tersangka pengrusakan lahan. Inipun yang dipastikan akan digali oleh tim hukumnya pada proses persidangan.

"Artinya tidak menyebutkan izin habis kemudian berhenti. Tidak disebutkan jangka waktu perjanjian. Sehingga menurut saya perjanjian masih berlaku atas perjanjian ini," pungkasnya.

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari

Jalan Penghubung Tiga Desa di Kongbeng Naik Kelas Dicor Beton

KONGBENG - Memperlancar akses transportasi jalan yang menghubungkan Desa Sidomulyo ke Desa Sri Pantun dan Kongbeng Indah, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) akhirnya kini membenahi jalan tersebut dengan menaikkan kualitas dengan rigid beton. Peningkatan jalan itu ditandai dengan pengecoran semen oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman di jalan depan Kantor Desa Sidomulyo, Kecamatan Kongbeng, Senin (25/9/2023).

Kegiatan ini turut disaksikan Camat Muara Bengkal Marlianto, Camat Kongbeng Jumran, Kadis PUPR M Muhir, Perwakilan PT Sinar Arengka Setia Maju Edy Prasetyo, unsur muspika dan beberapa staf Desa Sidomulyo.

Dikatakan, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, kegiatan pembangunan infrastruktur dari jalan, jembatan, bangunan maupun lainnya dari Pemkab Kutim harus dilakukan. Sebab juga ia telah berjanji dalam program prioritasnya

dalam "Menata Kutim Sejahtera untuk Semua". "Ada film berjudul Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, nah sekarang judul berubah menjadi Bupati Kutim tidak pernah ingkar janji," tegas Ardiansyah.

Untuk itu, Ardiansyah berkomitmen terus menyelesaikan pembangunan yang telah dicanangkan untuk mensejahterakan warga Kutim. Di sisi lain ia sudah bersumpah, maka dirinya terus berupaya semaksimal mungkin mewujudkan semuanya.

"Selamat kepada masyarakat Desa Sidomulyo, Sri Pantun dan Kongbeng Indah. Salah satu ruas jalannya kini dikerjakan untuk ditingkatkan menjadi beton. Meskipun jalan lingkungannya belum mendapatkan peningkatan jalan," ucapnya dihadapan Kades Sidomulyo Anshari dan Kades Sri Pantun Gita Angga Yudha.

Ardiansyah berpesan kepada warga sekitar proyek itu agar mendukung dan membantu para pekerja

dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Di tempat yang sama, Kadis PUPR Kutim M Muhir menyampaikan peningkatan jalan penghubung Desa Sidomulyo, Sri Pantun sampai Kongbeng Indah menggunakan skala multi-years. Dengan panjang ruas 9,246 kilometer, panjang efektif 6,480 kilometer, lebar badan jalan 6 meter dengan rigid pavement atau betonisasi dengan ketebalan 25 centimeter. "Dikerjakan oleh PT Sinar Arengka Setia Maju dengan nilai kontrak Rp 57.506.452.000 dan ditargetkan selesai selama 450 hari kalender. Kegiatan ini didanai dengan APBD Kutim," kata Muhir.

Terakhir, ia berharap dengan dibenahnya jalan tersebut dapat memudahkan mobilitas penduduk dan barang dalam menunjang laju perekonomian.

Pewarta : Irfan Aditama

Editor : Nicha Ratnasari



LET'S
GO
BEYOND



BOOKING THS SAJA

BTS

di Digiroom



DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNTETIC
SETIAP SERVICE BERKALA*



Kode Promo
BTSOLI

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan
Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

*Syarat dan ketentuan berlaku





Urusan Toyota lebih mudah!



Bontang



Petugas dan barang bukti serta para tersangka.

Polsek Kuaro Bekuk 4 TO Kasus Sabu di Paser

PASER - Sebanyak 4 orang diamankan petugas jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Kuaro atas kepemilikan narkotika jenis sabu, seberat total 0,55 gram yang dikemas dalam 2 paket, di RT 16, Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Senin 25/9/2023) pukul 23.00 WITA.

Keempat pelaku itu merupakan laki-laki berinisial SL (41), JH (25), SM (32) dan EAP (26) yang merupakan warga setempat. Kapolsek Kuaro, IPTU Andi Ferial menjelaskan, keempatnya ditangkap, setelah dilakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat yang diterima.

"Berdasarkan laporan masyarakat itu, kami lakukan penyelidikan dan

mengungkap kasus ini beserta barang bukti yang tersisa," kata IPTU Andi Ferial, Selasa (26/9/2023).

Pihaknya menyebut, lokasi penangkapan para pelaku diduga sebagai tempat untuk dilangsungkannya transaksi sabu. Dari hasil penelusurannya, petugas Polsek Kuaro mengetahui bahwa keempat pelaku merupakan Target Operasi (TO) Satesnarkoba Polres Paser.

Adapun 2 paket sabu yang diamankan, masing-masing 0,35 gram dan 0,22 gram. Selain itu, 2 buah alat isap, 1 unit timbangan digital, 1 buah botol kaca, pipet, korek api dan 3 unit telepon genggam.

"Barang bukti itu kami temukan

saat pengungkapan. Setelah diketahui, ternyata 4 pelaku ini merupakan TO," kata Andi Ferial.

Akibat perbuatan para pelaku, petugas menetapkan keempatnya sebagai tersangka dan dijerat pasal 114 ayat 1 juncto pasal 132 ayat 1 subsidier pasal 112 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

"Kami amankan semuanya kemudian para pelaku dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Kuaro, guna menjalani proses hukum lebih lanjut," pungkasnya.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari

Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Material Milik PAMA di Paser, 3 Pelaku Masih Diburu

PASER - Komplotan pencurian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan komponen mesin pompa milik kontraktor pertambangan PT Pamapersada Nusantara (PAMA) di site PT Kideco Jaya Agung (Kideco) diungkap Kepolisian Sektor (Polsek) Muara Samu.

Kapolsek Muara Samu, IPTU Ahmad Hasanuddin menjelaskan, dari pengungkapan itu, pihaknya mengamankan 2 pria yang diduga pelaku, yakni berinisial MR (20) dan AB (29) yang keduanya merupakan warga Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang.

"Dari pengungkapan ini kami amankan 2 pelaku beserta barang bukti," kata Ahmad Hasanuddin, saat dihubungi, Selasa (26/9/2023).

Adapun barang bukti yang diamankan yakni BBM jenis solar dan komponen mesin pompa, dengan nilai kerugian ditaksir Rp 700 juta. Sementara barang bukti lainnya seperti 1 unit mobil pengangkut dan 1 unit sepeda motor turut diamankan sebagai alat yang digunakan mencuri.

"Jadi ada 4 barang bukti yang diamankan. Baik itu yang dicuri maupun yang digunakan untuk mencuri," tambahnya.

Dijelaskan Hasanuddin, dari pengakuan kedua pelaku, aksi pencurian itu dilakukan oleh 5 orang. Sehingga pihaknya masih memburu 3 pelaku lainnya untuk diperiksa. Kendati begitu, pihaknya memastikan sudah mengantongi identitas para pelaku lainnya.

"Yang masih kami buru, dimana identitas dari ketiga orang tersebut sudah ada pada kami dan kami juga sudah menghubungi kepada pihak keluarga pelaku agar kooperatif dengan kami petugas," tegasnya.

Ia mengimbau agar para pelaku yang belum diamankan untuk segera menyerahkan diri. Karena, lanjut Hasanuddin, apabila tidak mengikuti imbauan tersebut, maka pihak petugas akan melakukan tindakan tegas.

Ia turut mengingatkan kepada masyarakat, agar selalu bersinergi dengan petugas serta memberikan informasi sekecil apapun, di mana informasi dari masyarakat dianggap sangat berarti dalam proses pengungkapan perkara tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

"Sehingga akan terwujud situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Kepolisian meminta agar para pelaku tersebut dapat menyerahkan diri," ucapnya.

Sembari memburu para pelaku lainnya, Polsek Muara Samu menetapkan kedua pelaku sebagai tersangka dan ditahan di Polsek Muara Samu. Sementara sanksi atas perbuatannya, terancam pasal 363 KUHP dengan hukuman 7 tahun penjara.

"Mereka kami tetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan," pungkasnya.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Kapolsek Muara Samu, IPTU Ahmd Hasanuddin.



Barang bukti hasil pencurian.



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Kepala Satpol-PP PPU, Margono Hadi Sutanto.

Satpol-PP PPU Bakal Tertibkan Batching Plant, Diduga Tak Berizin di Sepaku

PPU - Meski bakal menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN), Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) di wilayah Kecamatan Sepaku masih menjadi ranah kewenangan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU). Oleh karena itu, ke depan melalui Satpol-PP akan terus melaksanakan penertiban di wilayah tersebut.

Kepala Satpol-PP PPU, Margono Hadi Sutanto menuturkan telah menertibkan beberapa bangunan yang tidak berizin di Sepaku. Terutama yang mulai ada setelah adanya rencana pemindahan IKN, maupun sebelumnya.

"Ini memang merupakan kegiatan rutin kami, dan lebih khusus karena ada rencana pemindahan IKN ke Sepaku," ujarnya, Selasa (26/9/2023).

Meskipun, beberapa perizinan telah

ada di tangan Badan Otorita IKN. Namun izin prinsip dan beberapa lagi masih menjadi kewenangan daerah PPU.

"Jadi memang sesuai surat Mendagri, sampai Perpres pemindahan IKN Nusantara terbit maka kewenangan di Sepaku masih milik Satpol-PP PPU termasuk trantibum," tandasnya.

Adapun hingga kini pihaknya telah mengidentifikasi beberapa bangunan diduga liar. Beberapa terindikasi mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.

"Salah satunya, yakni batching plant. Ada sejumlah batching plant tanpa izin, dan tidak berkontribusi terhadap pembangunan proyek IKN Nusantara," ucap Margono.

Untuk itu, proses penertiban bangunan tersebut, akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Dalam penerti-

bannya, kata Margono, tetap berkoordinasi dengan Direktorat Trantibum dari Otorita IKN.

"Kami sudah berkomunikasi. Bentuk penindakan yang dilakukan yakni yustisi tetap bekerjasama dengan Otorita IKN," sebutnya.

Satpol-PP PPU terus berkoordinasi dengan pihak desa atau kelurahan, hingga pemerintah kecamatan. Tujuannya agar tidak lagi mengeluarkan rekomendasi apapun jika ada yang ingin mendirikan bangunan di wilayah IKN. "Jadi ke depan bersama dengan Trantibum OIKN, kita akan melakukan penertiban, jadi memang kalau bicara perizinan itu bicara kewenangan khusus otorita," pungkasnya.

Pewarta : Nur Robbi
Editor : Nicha Ratnasari



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat memimpin Rakor TPID bersama dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan, Bambang Setyo Pambudi.

TPID PPU Diminta Aktif Survei Lapangan, Pantau Stabilitas Harga Komoditas di Pasar

PPU - Menjaga inflasi daerah tetap dalam ambang normal, tidak hanya bisa dilakukan dengan adanya pertemuan. Namun juga dengan pemanfaatan langsung di lapangan.

Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun memimpin jalannya rapat Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) PPU, Selasa, (26/9/2023). Bertempat di Kantor Bupati PPU bersama dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan, Bambang Setyo Pambudi, sejumlah Sekkab PPU Tohar dan pimpinan OPD dan instansi terkait lainnya.

Makmur mengatakan bahwa pertemuan tersebut sangat penting dilaksanakan. Karena hal itu sesuai dengan salah satu arahan Presiden Jokowi padanya dalam menjaga

kestabilan harga bahan pokok dan tingkat inflasi di daerah.

"Itulah mengapa saya katakan pertemuan ini sangat penting," ucapnya.

Persoalan inflasi ini, tambahnya, juga menjadi arahan langsung pemerintah pusat melalui Kemendagri ke seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Agar rutin mengikuti rapat inflasi yang digelar setiap Senin pagi. Dan dapat memantau inflasi di seluruh Indonesia dalam rangka kestabilan ekonomi.

"Karena tugas Kita di daerah bagaimana agar bisa menjaga tingkat inflasi di kabupaten PPU ini tetap stabil. Ini perintah langsung dari presiden," tegasnya.

Dalam kesempatan ini pula, Makmur menegaskan bahwa pengendalian inflasi di PPU tidak cukup hanya dengan melakukan pertemuan

melalui rapat. Sebab yang mempengaruhi inflasi sangat banyak.

Pun, persoalan terkait itu terjadi sangat dinamis. Oleh karena itu, TPID PPU diminta untuk sering melakukan survei dan memantau di lapangan. Memonitoring perkembangan harga komoditas di lingkungan masyarakat.

"Beberapa hari lalu saya juga telah turun langsung ke pasar Nenang Penajam, untuk mengetahui harga sejumlah kebutuhan pokok bagi masyarakat di sana. Saya bersyukur sejumlah harga kebutuhan pokok yang ada di pasar Penajam ini relatif stabil," tutupnya.

Pewarta : Nur Robbi

Editor : Nicha Ratnasari



Dirgahayu
PT PAMAPERSADA NUSANTARA

27 September 2023

30



PAMA Maju Bersama Bangsa



LOWONGAN JURNALIS

Media online **MEDIA KALTIM GROUP** membutuhkan beberapa tenaga profesional untuk bergabung di tim redaksi **SAMARINDA & PENAJAM PASER UTARA (PPU) :**

JURNALIS

SYARAT:

Maksimal usia 25 tahun, berjiwa tim, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kreatif, dan menyukai tantangan. Fresh graduate boleh melamar, diutamakan kandidat berpengalaman bidang jurnalisme atau media

Deadline Pengirim CV & Lamaran 30 September 2023.

Pastikan mencantumkan posisi yang dilamar pada subjek email atau pesan WA.

Kirimkan ke **redaksi@mediakaltim.com**

atau WA ke **0853-4894-3982 (SAMARINDA)**
0815-4910-5488 (PPU)

radar.
MEDIA

MEDIA KALTIM GROUP

